

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) disebutkan bahwasannya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pendidikan di Indonesia pada tahapan jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dari jenjang pendidikan tersebut jenis pendidikan yang dapat diperoleh oleh peserta didik dapat bervariasi sesuai dengan minat dan bakatnya, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dari ketujuh jenis pendidikan tersebut pendidikan kejuruan menempati ranking teratas dalam kontribusinya terhadap upaya membangun sumber daya manusia dan memiliki pengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negara (www.kompasiana.com), hal tersebut sejalan dengan pengertian Pendidikan Kejuruan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang diperbaharui dengan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15) disebutkan bahwa: "merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu", yang lebih spesifiknya

terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Tahun 1990 Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah disebutkan bahwa "Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu". Menurut Putu S. (2012) nama pendidikan kejuruan mengalami perubahan kelembagaan dari khusus (dulu bernama STM, SMEA, SMKK, SMTK, SMSR, SMIK, SMM, dll) menjadi lebih umum dengan nama SMK dimaksudkan untuk memberi ruang kepada SMK agar lebih fleksibel dalam mengembangkan program kompetensi keahlian.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki misi utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, lulusan SMK juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi), selain itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai wirausaha mandiri. Namun demikian, data tentang jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2016 menunjukkan bahwa dari sebanyak 7,02 juta orang yang masih menganggur, persentase terbanyak adalah lulusan SMK, yakni sebesar 9,84 persen (Laporan BPS, Rabu 4 Mei 2016). Berdasarkan data tersebut, ketua BPS Suryamin menyatakan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK, ada sekitar 9 hingga 10 orang yang masih menganggur. Hal tersebut lebih memburuk pada pasalnya BPS merilis data per Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 14,7 juta orang atau 11,24 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terdapat pada penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah (www.republika.co.id). Dari data tersebut menunjukkan

kenaikan pengangguran yang tertinggi adalah lulusan SMK sebesar 1,4 persen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Fakta di atas mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK selama ini. Selain permasalahan terbatasnya lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan ekonomi negara yang belum sesuai harapan, tingginya angka pengangguran tersebut mengisyaratkan adanya permasalahan *mis-match* antara *supply and demand*, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

Esti Maharani dalam tulisannya SMK dan Pengangguran Terbuka pada Kamis, 29 November 2018 pukul 00:17 WIB (www.republika.co.id) mengemukakan banyak faktor yang membuat lulusan SMK menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran, yaitu : (1) banyaknya SMK yang tidak memiliki laboratorium dan hanya belajar teori saja. Padahal SMK kunci keberhasilan siswa terketak pada praktik langsung di bengkel atau di laboratorium, dan sekaligus pembaruan sarana dan prasarananya yang disesuaikan dengan perkembangan DU/DI. Sehingga pembelajaran akan terfokus pada penguasaan keterampilan, bukan hanya teori semata. (2) masih belum terjembatannya tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena *oversupply* antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri dan banyak tentang persoalan usia lulusan SMK yang rata-rata baru 17-18 tahun belum memenuhi syarat bekerja di industri sehingga harus menunggu hingga 19-20 tahun. (3) belum ada penyesuaian antara SMK ataupun vokasi dengan potensi daerah. Hal ini harus dilaksanakan agar program *link and macth* seperti di syaratkan PSG sejak tahun 1998 berhasil. Dengan penyesuaian tersebut akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM)

lulusan SMK yang berkualitas dan Industri lokal yang mampu menampung lulusan tersebut, misalnya : di daerah pantai, didirikan SMK dengan kompetensi keahlian yang sesuai, seperti Perikanan, Kelautan, dll. Sehingga tidak banyak SMK-SMK yang menjamur (kebanyakan swasta) yang didirikan hanya dengan latar belakang *trend* kompetensi keahlian saja, seperti di Kabupaten Sleman dari 53 SMK hanya ada 8 SMK negeri (www.slemankab.go.id), hal itu akan sangat memburuk apabila SMK-SMK tersebut tidak memiliki bengkel atau laboratorium untuk praktik siswa. (4) kompetensi guru, hal ini memang sangat dominan dimanapun, karena mayoritas guru SMK (yang mengajar produktif, sekarang kelompok mata pelajaran C3) hanya menguasai teori tanpa pernah langsung berkecimpung di dunia industri. Para guru juga akan mengajarkan apa yang ia terima pada saat pembelajaran mereka dahulu, padahal perkembangan industri sudah sangat pesat. Oleh sebab itu, kecepatan kebutuhan DU/DI tidak terikuti.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia tersebut (dapat dikatakan solusi dari permasalahan di atas) maka pada tanggal 9 September 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres tersebut ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Kesehatan), Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan

34 Gubernur untuk : (1) mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, dan (2) menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk : (a) membuat peta jalan pengembangan SMK, (b) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), (c) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, (d) meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), (e) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan (f) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Dari Inpres tersebut, revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven* (instruksi khusus Mendikbud poin b). Dalam hal ini, pendidikan kejuruan diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Dalam pengertian tersebut, jelas terdapat dua pihak yaitu lembaga pendidikan dalam hal ini SMK dan lapangan kerja atau DU/DI yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan kejuruan (Wardiman, 1998: 79). Oleh karena itu, desain kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pengujiannya juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri atau biasa disebut dengan sinkronisasi kurikulum.

Sementara itu, revitalisasi pendidikan di SMK secara operasional diwujudkan dalam perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek pendidikan, yaitu: (1) perubahan paradigma pendidikan kejuruan, (2) peningkatan mutu pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran abad XXI, Pergeseran Pembelajaran dari Kompetensi ke Kapabilitas, (3) peningkatan kerjasama dengan DU/DI, (4) penanaman jiwa kewirausahaan, (5) adaptasi dan kontekstualisasi lokal, (6) pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai: tempat praktik kerja (PKL), tempat magang kerja, dan tempat belajar manajemen dunia kerja, (7) penyelarasan kurikulum SMK, sesuai dengan model *dual system* yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*, dan (8) sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Langkah operasional yang dilakukan SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan DU/DI diantaranya dengan mengimplementasikan beberapa program kegiatan antara lain: peningkatan mutu pembelajaran, pembelajaran *teaching factory*, program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sampai saat ini diklaim sebagai implementasi Pendidikan Sistem Ganda, kemitraan dengan DU/DI, magang kerja, penyelarasan kurikulum SMK, dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Sesuai fakta, bahwa dalam implementasinya saat ini, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK pelaksanaannya disimplifikasi dalam bentuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau yang dikenal dengan Prakerin. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2008) dalam Imam S.,dkk. (2017) menyatakan bahwa: “praktik kerja industri yang disingkat dengan prakerin merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di Dunia Kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistim

pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistem Ganda (PSG)". Lebih lanjut dijelaskan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Bahan Bimbingan Teknis Pembelajaran SMK (2008) dalam Imam S.,dkk. (2017) prakerin bertujuan untuk : 1) pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum penguasaan, 2) implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja, 3) penumbuhan etos kerja/pengalaman kerja.

Dalam dinamikanya, di sebagian SMK khususnya di wilayah kegiatan PKL ini terkesan hanya asal jalan, dan jauh dari kriteria minimal sebagai implementasi konsep PSG. Sebagai konsekuensinya, pencapaian keahlian siswa SMK sebagaimana yang diidealkan oleh PSG, masih perlu dipertanyakan apakah dengan adanya PKL pencapaian kompetensi siswa benar-benar tercapai. Diberbagai daerah di Indonesia yang menghasilkan lulusan SMK, salah satunya adalah Kabupaten Sleman yang memiliki 53 SMK baik negeri maupun swasta (www.slemankab.go.id). Tentunya berbagai masalah yang kompleks timbul oleh karena dalam satu wilayah kabupaten memiliki 53 SMK yang harus menjalankan PSG dalam program PKL secara bersamaan.

Oleh karenanya Implementasi PKL di Kabupaten Sleman tersebut, sudah seharusnya dievaluasi pelaksanaannya. Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan mengambil sampel di dua SMK negeri di Kabupaten Sleman yang memiliki program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti, yaitu : SMK Negeri 2 Depok Sleman, dan SMK Negeri 1 Seyegan, yang dilaksanakan khusus pada rumpun program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti yang termasuk dalam rumpun Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa.

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap

implementasi kebijakan PSG dalam bentuk PKL, untuk menilai sejauhmana implementasi program PKL tersebut, baik aspek input atau persiapan PKL siswa di sekolah, proses yang merupakan pelaksanaan program PKL di lapangan, maupun output yang berwujudkan penilaian terhadap siswa telah memenuhi kriteria PSG.

Berdasarkan hasil penelitian Badrun Kartowagiran, dkk. (2017), menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) telah memenuhi kriteria minimal. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa meskipun proses pelaksanaan PKL (dulu Prakerin) sudah berjalan baik, namun masih ada aspek yang masih lemah. Adapun pelaksanaan yang masih kurang antara lain: proses pelaksanaan PKL adalah dalam aspek frekuensi monitoring dan pembimbingan siswa yang sedang menjalankan PKL. Dalam hal ini, frekuensi pembimbing PKL dalam melakukan monitoring dan pembimbingan terhadap siswa yang sedang melaksanakan PKL hanya dilakukan setiap bulan. Sedangkan menurut penilaian siswa, aspek pelaksanaan PKL yang masih lemah terletak pada durasi (lama) waktu pelaksanaan PKL yang hanya berkisar antara 2 – 3 bulan.

Penelitian mengenai evaluasi implementasi PKL dalam kaitannya dengan PSG perlu dilaksanakan secara rutin, karena dari evaluasi implementasi PKL ini, diharapkan SMK atau pendidikan menengah kejuruan di Indonesia dapat tetap eksis, lulusannya dapat bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian, DU/DI juga dapat diuntungkan dengan mendapatkan tenaga kerja terampil yang upahnya terjangkau, dan Pendidikan Sistem Ganda semakin berhasil sehingga terciptanya ketergantungan antara DU/DI dengan SMK maupun SMK dengan DU/DI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah yang ada, yaitu :

1. Persentase pengangguran terbanyak pada per Februari 2016 adalah lulusan SMK yaitu sebesar 9,84% dari 7,02 juta orang yang masih menganggur atau dari 100 angkatan kerja lulusan SMK, ada sekitar 9 hingga 10 orang yang masih menganggur. Dan bertambah sebesar 1,4% per November 2018 menjadi 11,24% atau sebesar 14,7 juta orang.
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai harapan padahal lulusan SMK yang banyak tiap tahun ketahun.
3. Terjadi *mismatch* antara SMK dengan DU/DI, sehingga *supply* lulusan dari SMK tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Banyaknya SMK yang tidak memiliki labolatorium dan hanya belajar teori saja, kebanyakan SMK membuka jurusan hanya sebatas trend yang sedang gencar dikalangan siswa. Padahal kunci keberhasilan siswa SMK terletak pada praktik langsung di bengkel atau laboratorium.
5. Belum tersalurkannya tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, karena *oversupply* antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
6. Persoalan usia lulusan SMK yang rata-rata baru 17-18 tahun belum memenuhi syarat bekerja di industri sehingga harus menunggu hingga 19-20 tahun.
7. Belum ada penyesuaian antara SMK ataupun vokasi dengan potensi daerah.
8. Kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri yang terkadang tidak cocok.

9. Kompetensi guru yang tidak ter-*update* sehingga pembelajaran di SMK tidak mengikuti perkembangan DU/DI, karena mayoritas guru SMK (yang mengajar mata pelajaran produktif, sekarang kelompok mata pelajaran C3) hanya menguasai teori tanpa pernah langsung berkecimpung di dunia industri.
10. Revitalisasi SMK sesuai Inpres 9 September 2016 diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri, sedangkan DU/DI dan SMK terkadang tidak selaras dalam kebutuhan industri dan kurikulum SMK.
11. Dalam dinamika pelaksanaannya, di sebagian SMK kegiatan PKL terkesan hanya asal jalan, dan jauh dari kriteria minimal sebagai implementasi konsep Pendidikan Sistem Ganda. Sebagai konsekuensinya, pencapaian kompetensi keahlian siswa SMK sebagaimana yang diidealkan oleh Pendidikan Sistem Ganda, masih perlu dipertanyakan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang diteliti, agar lebih fokus dalam mengkaji permasalahan serta penafsiran terhadap hasil penelitian tidak berbeda. Masalah yang diangkat dalam tugas akhir skripsi ini terbatas pada evaluasi implementasi/pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai simplikasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan tersebut diangkat karena pada identifikasi masalah dipaparkan mengenai tingkat pengangguran terbanyak per November 2018 adalah SMK,

terbatasnya lapangan pekerjaan akibat belum adanya penyesuaian SMK dengan potensi daerah, kebanyakan SMK belum memiliki laboratorium, dan yang utama adalah revitalisasi SMK yang mengangkat kembali penerapan pendidikan sistem ganda, sangatlah berpengaruh pada pelaksanaan program PKL yang telah berjalan hingga sampai saat ini. Dalam kaitannya dengan PKL beberapa masalah yang dipaparkan, bisa saja pada saat pelaksanaan PKL entah sekolah atau pihak industri kurang memperhatikan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan tetapi karena keterbatasan sekolah atau industri hal tersebut tidak terlaksana, sehingga dalam proses pelaksanaan PKL, siswa akan terkesan hanya asal PKL dan kompetensi siswa yang seharusnya didapatkan pada saat PKL hanya sebatas sertifikat saja. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwasannya pengangguran SMK yang menjadi evaluasi sehingga dikeluarkannya Inpres Presiden 9 September 2016 tersebut juga berkaitan dengan kompetensi siswa hasil pelaksanaan PKL yang terkesan hanya asal jalan saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, “Seberapa tingkat ketercapaian implementasi praktik kerja lapangan (PKL) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun penilaiannya?”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengevaluasi tingkat persiapan siswa sebelum melaksanakan PKL di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman.
2. Mengevaluasi pelaksanaan PKL di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman.
3. Mengevaluasi penilaian PKL terhadap siswa di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian evaluasi implementasi praktik kerja lapangan (PKL) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti ini meliputi beberapa pihak yang terkait, yang nantinya dapat disarankan oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut untuk dijadikan kritik dan saran sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju. Manfaat tersebut adalah: (1) secara teoritis dan (2) secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan.
- b. Diperolehnya informasi mengenai implementasi PSG dalam bentuk PKL yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan dasar rekomendasi peningkatan mutu implementasi PKL di SMK pada masa-masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai wahana dalam menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjalani studi, serta menambah pengalaman, wawasan keilmuan, dan wahana untuk melatih keterampilan menulis karya ilmiah dan sebagai salah satu

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

b. Bagi sekolah

Menjadi evaluasi bagi sekolah, untuk tetap memberikan pengawasan dan perhatian siswa yang sedang melaksanakan PKL di Industri agar tetap sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing.

c. Bagi DU/DI

Hasilnya dapat dijadikan sebagai saran untuk pelaksanaan proses PKL atau Prakerin di SMK maupun di Industri.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan koleksi perpustakaan dan sumber penelitian yang sejenis.